

KEBIJAKAN PEMBELAJARAN TEMATIK TERPADU KURIKULUM 2013

Pengantar Kuliah Umum Program Studi Pendidikan Dasar
Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan
Sabtu, 7 September 2013

Oleh:

SAMSURI
e-mail: samsuri@uny.ac.id
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Pendahuluan

Cummings dan Williams (2005: 125) mengidentifikasi ada enam model pembaharuan kebijakan pendidikan yang muncul sepanjang paruh terakhir abad ke-20. Keenam model tersebut ialah model: (1) *neo-colonial*, (2) *centralised*, (3) *decentralised-regionalisation*, (4) *decentralised-sectoral*, (5) *community-based*, dan (6) *transformative*. **Model neo-kolonial** terjadi ketika model-model pendidikan “diekspor” dari negara inti (negara penjajah) ke negara (bekas) jajahan. Model **tersentralisasi pasca-kolonial** terjadi manakala kebijakan-kebijakan pendidikan dari suatu negara yang telah merdeka, banyak ditentukan pengembangannya oleh negara (pemerintah pusat). **Model desentralisasi-regionalisasi** terjadi manakala kebijakan pendidikan suatu negara banyak ditentukan oleh badan-badan internasional seperti UNESCO ataupun Bank Dunia terhadap pembaharuan dan implementasi kebijakan pendidikan suatu negara. **Model neo-liberal (reformasi sektoral-terdesentralisasi)** terjadi ketika pembaharuan pendidikan di suatu negara banyak melibatkan peran-peran non-negara, seperti organisasi-organisasi non-pemerintah (NGOs) baik secara nasional maupun internasional, dalam proses dan implementasi kebijakan pembaharuan pendidikan nasional. **Model reformasi pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat** memiliki karakteristik kebijakan pendidikan melalui persekolahan yang cenderung lebih kecil dan dekat dengan lokasi kehidupan siswa, yakni rumah tinggal siswa; juga sekolah-sekolah komunitas untuk masyarakat pribumi (penduduk asli yang tertinggal), kelompok minoritas; melibatkan para donor internasional melalui NGO, guna memenuhi program *education for all* (EFA). **Model transformatif** merupakan antitesis dari model tradisional pendidikan yang cenderung melegitimasi penindasan oleh sistem ekonomi, sosial dan politik serta penyebaran

ideologi yang bertopeng penindasan, yang menyembunyikan kepentingan-kepentingan untuk menyelamatkan akumulasi modal. Model transformatif ini pernah banyak dilakukan di sejumlah masyarakat negara-negara sosialis seperti Kuba, Tanzania, Guinea-Bissau, and Nikaragua, di samping perlawanan terhadap rezim *apartheid* di Afrika Selatan (Cummings dan Williams, 2005: 125-139).

Dari keenam model pembaharuan kebijakan pendidikan tersebut, tampak sulit mencari contoh model yang tepat untuk menjelaskan haluan kebijakan pendidikan terutama untuk satuan pendidikan persekolahan di Indonesia. Namun, dari pengalaman implementasi kebijakan pendidikan selama era Orde Baru, model desentralisasi-regionalisasi pernah diterapkan dan tampaknya masih berlangsung di era pasca-Orde Baru sekarang. Hal ini dapat dicermati dari kebijakan pembangunan nasional yang di dalamnya juga memuat kebijakan pendidikan, yang banyak mengadopsi gagasan-gagasan UNESCO dan Bank Dunia, serta Badan Moneter Internasional (IMF).

Bagaimana dengan kebijakan Kurikulum 2013 dalam politik pendidikan nasional Indonesia? Polemik di seputar wacana perubahan kurikulum di Indonesia tampaknya memerlukan perhatian intensif berkelanjutan dalam serangkaian penelitian-penelitian kebijakan pendidikan. Hal ini patut disadari, mengingat kritik yang selalu muncul termasuk terhadap Kurikulum 2013, pembuatan kebijakan pendidikan amat sering tidak diperkuat dengan basis penelitian yang memadai.

Dalam makalah ini, pertama dibedakan pembahasan antara pembaharuan politik dan pembaharuan pendidikan, meskipun kebijakan bidang pendidikan pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari sistem politik yang sedang berlangsung. Untuk ini penting melihat kajian Huntington (1991/1992: 583) ketika menganalisis bagaimana suatu negara mengalami pergeseran dari sistem pemerintahan otoritarian ke sistem demokrasi, berguna untuk melihat perubahan kebijakan pendidikan termasuk perubahan Kurikulum sekolah. Huntington membagi tiga macam pergantian sistem pemerintahan dari otoritarian ke demokratis. Pertama, *transformation*, terjadi ketika elit yang menduduki kekuasaan membawa perubahan ke dalam sistem demokrasi. Kedua, *replacement*, terjadi ketika kelompok oposisi yang mengambil alih kekuasaan membawanya ke dalam sistem demokrasi, dengan menjatuhkan/mengeluarkan rejim otoritarian dari seluruh kekuasaan. Ketiga, *transplacement* atau *ruptforma*, terjadi ketika ada kerjasama antara pemerintah yang berkuasa dengan kelompok oposisi untuk membawa sistem politik ke arah demokratisasi.

Pembaharuan kebijakan pendidikan dapat mengikuti ketiga pola sebagaimana tipologi Huntington tersebut, yakni upaya pembaharuan pendidikan baik semata-mata oleh

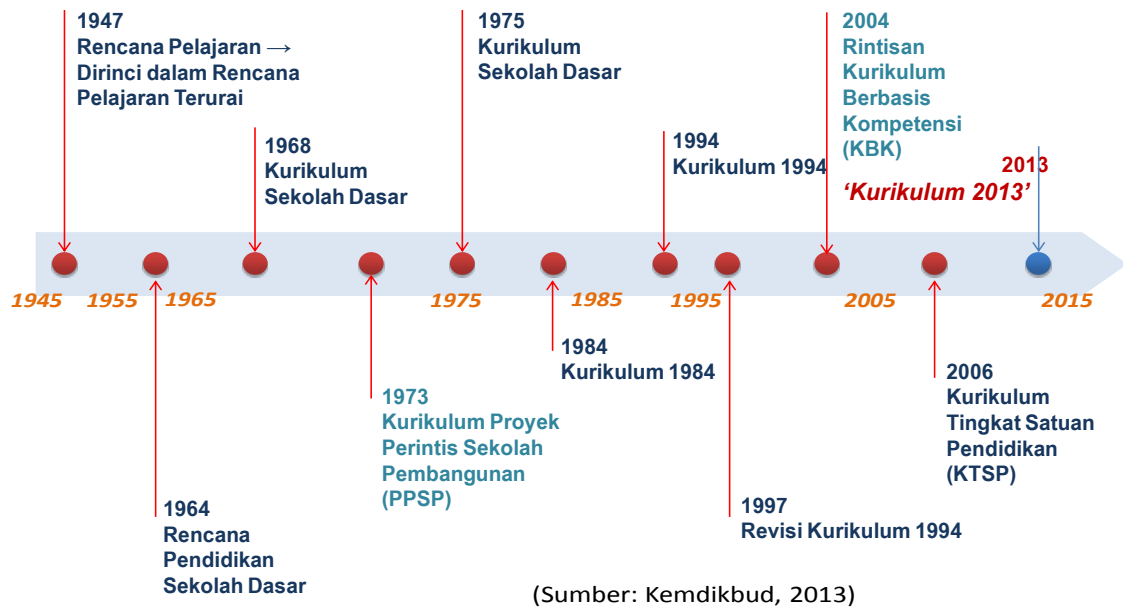
kemauan penguasa, kemauan pihak oposisi, atau gabungan antara pihak pemerintah dengan kelompok oposisi. Dengan demikian, pembaharuan kebijakan pendidikan diartikan sebagai upaya perubahan dan perbaikan ke arah kemajuan dalam dunia pendidikan secara komprehensif, baik dilakukan oleh pemerintah yang sedang berkuasa, oleh kelompok oposisi yang mengambil alih kekuasaan, atau kerjasama antara pemerintah dan oposisi. Pertanyaan yang muncul dari teoretisasi Huntington itu ialah, apakah kebijakan pendidikan nasional dan khususnya kebijakan Kurikulum di Indonesia merupakan salah satu akibat dari tiga bentuk pergeseran dari pemerintahan otoritarian ke pemerintahan demokratis? Pertanyaan ini menjadi relevan ketika mencermati argumentasi dan politik kebijakan yang muncul baik di parlemen maupun pemerintah Indonesia itu seputar Kurikulum 2013.

Kajian tentang pembaharuan kebijakan pendidikan akan mencakup aspek proses dan hasil. Proses yang berkait erat dengan proses politik pendidikan, dengan mengikuti mekanisme pembuatan keputusan, akan dimulai dari tahap *input*, *process*, dan *output*. Margaret S. Archer (1985: 39) menjelaskan politik pendidikan sebagai “... the attempts (conscious and organized to some degree) to influence the inputs, processes and outputs of education, whether by legislation, pressure group or union action, experimentation, private investment, local transactions, international innovation or propaganda.” Dari pengertian tersebut, tampak jelas bahwa kegiatan pembaharuan kebijakan pendidikan akan melibatkan banyak elemen baik di tingkat suprastruktur maupun infrastruktur, yang tujuan utamanya ialah terjadi perubahan dan pembaharuan di bidang pendidikan. Proses *decision making* Kurikulum 2013 menggambarkan bagaimana politik kebijakan pendidikan nasional melalui Kurikulum persekolahan telah dimulai dari gencarnya Uji Publik (Akhir November- 24 Desember 2012) sampai dengan Pencanangan IMPLEMENTASI KURIKULUM secara “terbatas” kepada sekolah sasaran pada awal tahun ajaran 2013/2014 tanggal 15 Juli 2013.

Gagasan pembelajaran tematik terpadu yang dilekatkan dalam kebijakan Kurikulum 2013 khususnya untuk jenjang sekolah dasar pun tidak dapat dilepaskan dari proses politik pendidikan yang melingkupinya. Keberhasilan Politik pendidikan sebagaimana Kebijakan Kurikulum 2013 akan mempergunakan pula domain-domain sebagaimana dikenal dalam ilmu politik seperti : kekuasaan (*power*), pengaruh (*influence*), konflik, dan alokasi nilai-nilai otoritatif (*authoritative allocation of values*) (Kenneth K. Wong, 1995: 21).

Bukankah perubahan dan pergantian Kurikulum dalam sejarah kebijakan pendidikan nasional di Indonesia sudah sering terjadi? Sejak Indonesia merdeka, sekitar 12 kali sistem pendidikan nasional Indonesia telah berubah-ubah kurikulum. Perubahan terakhir ialah dengan pemberlakuan Kurikulum 2013 untuk menggantikan Kurikulum 2006 yang

lebih dikenal sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Perjalan perubahan Kurikulum pendidikan di Indonesia dapat disimak dalam Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Kebijakan Pembelajaran Tematik Terpadu dalam Kurikulum 2013

Fokus perhatian makalah ini sebenarnya, sebagaimana topik utama kuliah umum Program Pendidikan Dasar Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang ditawarkan kepada penulis, ialah untuk membedah kebijakan pembelajaran tematik terpadu dalam Kurikulum 2013. Relevansi topik kajian dengan program studi ialah bahwa Kebijakan Pembelajaran Tematik Terpadu menjadi aspek penting dalam *delivery system* dari Kurikulum 2013 itu sendiri. Dalam catatan penulis, sejak Kurikulum 2006 sekolah sudah diperkenalkan dengan pendekatan pembelajaran terpadu seperti untuk Mata Pelajaran IPA dan IPS di SMP/MTs. Di level sekolah dasar ada dorongan dan ikhtiar dan dorongan agar guru menggunakan pembelajaran tematik terpadu terutama untuk kelas rendah mulai kelas 1 sampai kelas 3. Sepanjang forum PLPG di Rayon 111 yang penulis lakukan sebagai

instruktur dan asesor sertifikasi guru, banyak dijumpai kenyataan bahwa sebagian besar guru-guru yang mengajar di kelas rendah SD belum akrab dengan pendekatan pembelajaran tematik terpadu di kelasnya masing-masing.

Pengalaman belajar dalam Kurikulum sebelumnya, yang cenderung disipliner, sarat beban materi kognitif, *over lapping* antar materi yang sama di mata pelajaran berbeda, antara lain salah satu sebab perlunya pembelajaran tematik terpadu penting diterapkan sejak di SD. Oleh Pengembang Kurikulum 2013 diyakini bahwa pembelajaran tematik terpadu merupakan sebagai salah satu model pengajaran yang efektif (*highly effective teaching model*). Selain itu, pembelajaran tematik terpadu dianggap mampu mewadahi dan menyentuh secara terpadu dimensi emosi, fisik, dan akademik (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 67 Tahun 2013 menegaskan bahwa Kurikulum 2013 untuk sekolah dasar didesain dengan menggunakan pembelajaran tematik terpadu. Desain tersebut diberlakukan mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6.

Desain Kurikulum 2013 SD

No	Komponen	I	II	III	IV	V	VI
Kelompok A							
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	4	4	4	4	4	4
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	5	6	6	4	4	4
3	Bahasa Indonesia	8	8	10	7	7	7
4	Matematika	5	6	6	6	6	6
5	IPA	-	-	-	3	3	3
6	IPS	-	-	-	3	3	3
Kelompok B							
7	Seni Budaya & Prakarya (termasuk muatan lokal*)	4	4	4	5	5	5
8	Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan (termasuk muatan lokal).	4	4	4	4	4	4
Jumlah		30	32	34	36	36	36

06/09/2013

Sumber : Permendikbud No. 67 Tahun 2013

14

Dari latar belakang tersebut, pertanyaan yang relevan tentang kebijakan pembelajaran tematik terpadu dalam Kurikulum 2013 adalah: Mengapa perlu pembelajaran tematik terpadu? Apa yang dipadukan dalam pembelajaran tema-tema itu? Bagaimana memadukan tema-tema pembelajaran? Bagaimana mengukur keefektifan pembelajaran tematik terpadu?

Asumsi Pembelajaran Tematik Terpadu

Dalam pemikiran para pengembang Kurikulum 2013 tentang pembelajaran tematik terpadu, antara lain dibangun dengan:

1. Premis utama pembelajaran tematik terpadu bahwa peserta didik memerlukan peluang tambahan (*additional opportunities*) untuk menggunakan talentanya;
2. menyediakan waktu bersama yang lain untuk secara cepat mengkonseptualisasi dan mensintesis;
3. relevan untuk mengakomodasi kualitatif lingkungan belajar;
4. menginspirasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar.
5. memiliki perbedaan kualitatif (*qualitatively different*) dengan model pembelajaran lain, karena sifatnya memandu peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher levels of thinking*) atau keterampilan berpikir dengan mengoptimasi kecerdasan ganda (*multiple thinking skills*), sebuah proses inovatif bagi pengembangan dimensi sikap, keterampilan dan pengetahuan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

Dari paparan tersebut, tampak bahwa Pembelajaran Tematik Terpadu penting dilaksanakan terutama untuk semua kelas di sekolah dasar karena kemanfaatannya yang banyak. Pengembang Kurikulum 2013 menyebutkan bahwa manfaat tersebut antara lain terasa dalam hal:

1. Suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan.
2. Menggunakan kelompok kerjasama, kolaborasi, kelompok belajar, dan strategi pemecahan konflik yang mendorong peserta didik untuk memecahkan masalah
3. Mengoptimasi lingkungan belajar sebagai kunci kelas yang ramah otak (*brain-friendly classroom*).
4. Peserta didik secara cepat dan tepat waktu mampu memproses informasi. Proses itu tidak hanya menyentuh dimensi kuantitas dan kualitas mengeksplorasi konsep-konsep baru dan membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan secara siap.
5. Proses pembelajaran di kelas mendorong peserta didik berada dalam format ramah otak.

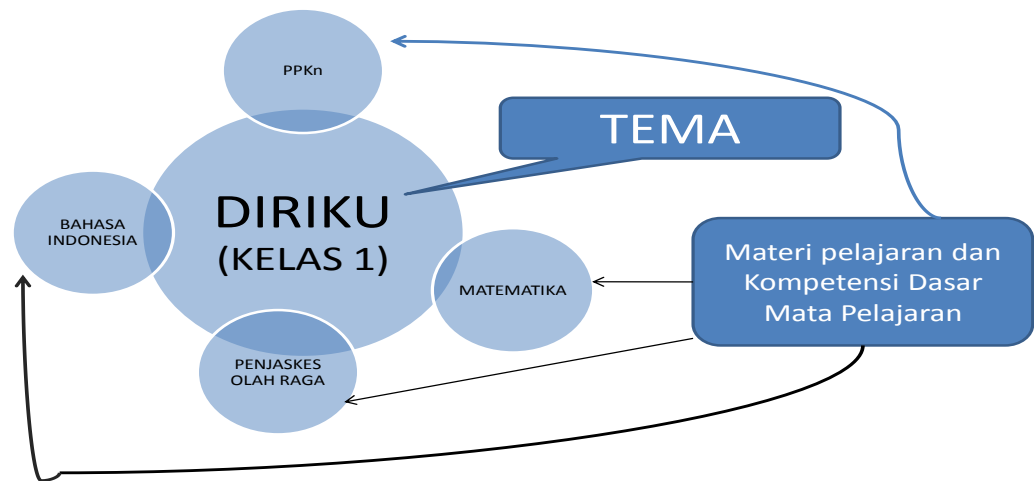
6. Materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru dapat diaplikasikan langsung oleh peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari.
7. Peserta didik yang relatif mengalami keterlambatan untuk menuntaskan program belajar dapat dibantu oleh guru dengan cara memberikan bimbingan khusus dan menerapkan prinsip belajar tuntas.
8. Program pembelajaran yang bersifat ramah otak memungkinkan guru untuk mewujudkan ketuntasan belajar dengan menerapkan variasi cara penilaian (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

Kebijakan pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar disokong dengan penyediaan buku siswa dan buku guru untuk pembelajaran masing-masing tema. Ini tentu saja berbeda dengan kebijakan kurikulum sebelumnya, yang tidak secara eksplisit disebut dalam dokumen yuridisnya (semacam peraturan menteri), maka dalam Kurikulum 2013 untuk SD semua jenjang kelas harus menggunakan pembelajaran tematik terpadu untuk semua mata pelajaran, kecuali Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.

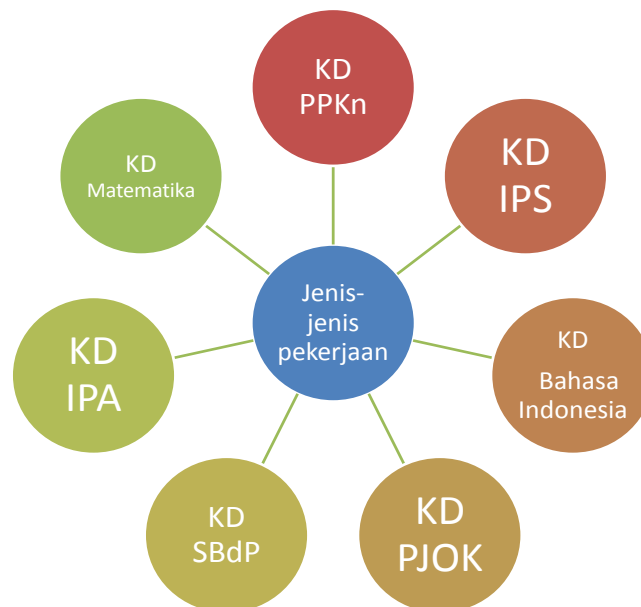
Kata pengantar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh dalam setiap buku tematik terpadu di Kelas 1 dan 4 SD/MI menjelaskan bahwa pembelajaran tematik terpadu seperti dimuat dalam buku-buku tersebut merujuk dan untuk itu berbasis kompetensi dari mata-mata pelajaran yang ditekankan. Dengan demikian pembelajaran tematik terpadu sebagai unsur Kurikulum 2013 di SD juga mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi Kompetensi. Pembelajarannya pun dirancang untuk dicapai melalui proses pembelajaran berbasis penemuan (*discovery learning*) melalui kegiatan-kegiatan berbentuk tugas (*project based learning*) yang mencakup proses-proses: **Mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan**. Buku siswa pembelajaran tematik terpadu memuat materi yang terdapat dalam mata-mata pelajaran di SD dan pembelajarannya berbasis aktivitas. Oleh Mendikbud dikatakan bahwa siswa mempelajari semua mata pelajaran secara terpadu melalui tema-tema kehidupan yang dijumpai peserta didik sehari-hari. Proses pembelajarannya pun bersifat transdisipliner dimana kompetensi yang diajarkan dikaitkan dengan konteks peserta didik dan lingkungannya. Materi mata-mata pelajaran dikaitkan satu sama lain sebagai satu kesatuan membentuk pembelajaran multi-disipliner dan inter-disipliner untuk menghindari tumpang tindih dan ketidak selarasan antar materi mata pelajaran.

Jika hadirin sempat membaca buku guru untuk SD kelas 1 dan 4 yang kini sudah digunakan di sekolah sasaran, tampak bahwa pembelajaran tematik terpadu menggunakan pola atau model berjaring laba-laba. Model ini berangkat dari pendekatan tematis sebagai

acuan dasar bahan dan kegiatan pembelajaran. Tema yang dibuat dapat mengikat kegiatan pembelajaran, baik dalam mata pelajaran tertentu maupun antarmata pelajaran (lihat Materi Sosialisasi Kurikulum 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).



Gambar 2. Materi Pelajaran dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran menjadi Acuan Pembelajaran Tematik Terpadu



Gambar 3. Model Laba-laba Pembelajaran Tematik Terpadu Tema Jenis-Jenis Pekerjaan

Dengan memperhatikan Gambar 2 dan 3 di atas, maka tampak jelas bahwa tema berperan sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran sekaligus dengan membuat/mengangkat sebuah tema yang dapat mempersatukan indikator dari mata-mata pelajaran: PPKn; Bahasa Indonesia; Matematika; IPA; IPS; Seni-Budaya dan Prakarya; serta, Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan.

Tema-tema Pembelajaran SD I-III

KELAS I	KELAS II	KELAS III
<ol style="list-style-type: none"> 1. Diriku 2. Kegemaranku 3. Kegiatanku 4. Keluargaku 5. Pengalamanku 6. Lingkungan Bersih, Sehat dan Asri 7. Benda, Binatang, dan Tanaman di sekitarku 8. Peristiwa Alam <small>06/09/2013</small>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hidup Rukun 2. Bermain di Lingkunganku 3. Tugas Sehari-hari 4. Aku dan Sekolahku 5. Hidup Bersih dan Sehat 6. Air, Bumi, dan Matahari 7. Merawat Hewan dan Tumbuhan 8. Keselamatan di rumah dan di perjalanan <small>SAMSURI 2013</small>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sayangi Hewan dan Tumbuhan di Sekitar 2. Pengalaman yang Mengesankan 3. Mengenal Cuaca dan Musim 4. Ringan Sama Dijinjing Berat Sama Dipikul 5. Mari Kita Bermain dan Berolah raga 6. Indahnnya Persahabatan 7. Mari Kita Hemat Energi untuk Masa Depan 8. Berperilaku Baik dalam Kehidupan Sehari-hari 9. Menjaga Kelestarian Lingkungan <small>16</small>

Tema-tema Pembelajaran SD IV-VI

KELAS IV	KELAS V	KELAS VI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indahnnya Kebersamaan 2. Selalu Berhemat Energi 3. Peduli terhadap Makhluk Hidup 4. Berbagai Pekerjaan 5. Menghargai Jasa Pahlawan 6. Indahnnya Negeriku 7. Cita-Citaku 8. Daerah Tempat Tinggalku 9. Makanan Sehat dan Bergizi <small>06/09/2013</small>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermain dengan benda-benda di sekitar 2. Peristiwa Dalam Kehidupan 3. Hidup rukun 4. Sehat itu Penting 5. Bangga Sebagai Bangsa Indonesia <small>SAMSURI 2013</small>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selamatkan Makhluk Hidup 2. Persatuan Dalam Perbedaan 3. Tokoh dan Penemu 4. Globalisasi 5. Wirausaha 6. Kesehatan Masyarakat <small>17</small>

Catatan terhadap Kebijakan Pembelajaran Tematik Terpadu Kurikulum 2013

Melalui forum ini penulis tidak ingin memberikan penilaian tentang pembelajaran tematik terpadu dalam Kurikulum 2013 SD. Namun, penulis memandang perlu memberikan semacam catatan yang mungkin terlalu dini dan perlu dibuktikan di lapangan melalui proses kajian ilmiah, seperti penelitian untuk tesis/disertasi di program pascasarjana.

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan tentu saja terasa jika ujung tombak pelaksana kebijakan itu secara efektif merasakan dampaknya secara positif. Pembelajaran tematik terpadu sebagai model kebijakan dalam Kurikulum 2013 SD di Indonesia pada akhirnya akan tergantung kepada kesiapan dan kemampuan guru menerjemahkan asumsi dan filosofi yang dikembangkannya melalui sejumlah perangkat instrumentasinya.

Faktor guru tampaknya menjadi penentu utama karena penulis merasakan kekhawatiran dalam beberapa hal sebagai berikut.

- Ketercakupan tema → mereduksi kajian multidisipliner/interdisipliner pada tema tertentu
- **Buku** sebagai pokok sumber belajar → kecenderungan membentuk *textbook minded*
- *Buku Siswa* dalam prakteknya langsung digunakan sebagai lembar kerja siswa, namun cerita dari lapangan banyak sekolah-sekolah harus menambah biaya dengan mem-foto copy buku siswa, karena buku siswa sebagian besar merupakan tempat siswa mengerjakan tugas dan kegiatan belajar.
- **Diversitas kurikulum dan keragaman Indonesia** → terindikasi penyeragaman teks dan konteks tema dan materi pembelajaran untuk seluruh sekolah di daerah-daerah perkotaan maupun perdesaan, dari Sabang sampai Merauke. Hadir tokoh-tokoh dalam buku siswa seperti dicontohkan di Tema 1 kelas 1 SD yang "*Javanese centered.*"
- **Penilaian Proses dan Hasil Belajar** → *kebiasaan lama* penilaian bersifat **positivistik-kuantitatif**, hasil belajar diukur dari pencapaian angka-angka capaian hasil belajar peserta didik
- **Peran guru pendidikan jasmani dan olah raga** → antara *team teaching* dengan guru kelas dan pemenuhan batas minimal 24 JP untuk kebutuhan syarat tunjangan profesi.

Di luar persoalan tersebut, pada akhirnya patut disadari bahwa Kurikulum hanyalah alat, kendaraan, untuk menyampaikan pesan (tujuan) pendidikan secara utuh, sehingga dalam

pengembangannya akan selalu memerlukan kreativitas pelaku di lapangan. Guru merupakan garda depan keberhasilan menyampaikan pesan tersebut.

Kurikulum bukan satu-satunya instrumen utama keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional, sehingga perubahan kebijakan kurikulum seharusnya dimaknai sebagai sebuah keniscayaan untuk menjawab setiap perubahan di masyarakat itu sendiri. Pilihan pembelajaran tematik terpadu dalam Kurikulum 2013 SD seyogianya tidak hanya puas dengan penyediaan perangkat pembelajaran seperti buku siswa DAN buku guru, tetapi kesiapan kultur pendekatan holistik multidisipliner untuk secara cerdas MEMAKNAI setiap peristiwa dan pengalaman hidup sebagai diri, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara sejak jenjang pendidikan dasar.

Daftar Referensi

- Archer, M. S. (1985). "Educational Politics: A Model for Their Analysis." dalam Ian McNay dan Jenny Ozga. (eds.). *Policy-Making in Education*. Oxford: Pergamon Press and The Open University, pp. 39-64
- Cummings, W. K. dan Williams, J., (2005) "International Development Models for Educational Reform," *Asia Pacific Journal of Education*, Vol. 25, No. 2, pp. 125-143
- Huntington, S. P. (1991/1992). "How Countries Democratize". *Political Science Quarterly*, Vol. 106, No. 4, pp. 579-616
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2013) Materi Sosialisasi Kurikulum 2013 untuk Asesor Sertifikasi Guru, di Rayon 111 Universitas Negeri Yogyakarta, Juli 2013.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013). *Buku Tematik Terpaduk Kurikulum 2013 Buku Siswa dan Buku Guru Kelas 1 dan Kelas 4*. Tersedia di bse.kemdiknas.go.id
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 67 Tahun 2013
- Wong, K. J. (1995). "The Politics of Education: From Political Science to Interdisciplinary Inquiry." dalam Jay D. Scribner dan Donald H. Layton (eds.), *The Study of Educational Politics*. Washington D.C, dan London: The Falmer Press, pp. 21-35